

**MONOGRAF  
KEWARGANEGARAAN**

*di Era*  
**DISRUPSI**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **MONOGRAF KEWARGANEGARAAN**

*di Era*

# **DISRUPSI**

**Marsyah, Didiek R. Mawardi, Irhammudin, Arif Rahman,  
Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, Nurdin Habim,  
Slamet Haryadi, Suwardi, Agung Utomo, Ery Setyanegara,  
Slamet Riyanto, Muhammad Nuzul Setiawan, Joni Bedyal,  
Ibrahim Fikma, Al Fitri, Nabila Zatadini, Adinda Akhsanal Viqria**

**Editor :  
M. Ruhly Kesuma Dinata**



**PUSAKA MEDIA**

## **MONOGRAF KEWARGANEGARAAN DI ERA DISRUPSI**

### **Penulis:**

Marsyah, Didiék R. Mawardi, Irhammudin, Arif Rahman,  
Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, Nurdin Habim,  
Slamet Haryadi, Suwardi, Agung Utomo, Ery Setyanegara,  
Slamet Riyanto, Muhammad Nuzul Setiawan, Joni Bedyal,  
Ibrahim Fikma, Al Fitri, Nabila Zatadini, Adinda Akhsanal Viqria

### **Editor:**

M. Ruhly Kesuma Dinata

### **Desain Cover & Layout**

Pusaka Media Design

viii + 78 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Februari 2024

**ISBN: 978-623-418-270-5**

### **Sumber Gambar**

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4988/belajar-pancasi-la-menyenangkan-dan-relevan?lang=1>

<https://humasindonesia.id/berita/disrupsi-teknologi-gelombang-kedua-pr-harus-bagaimana--495>

Penerbit

**PUSAKA MEDIA**

**Anggota IKAPI**

**No. 008/LPU/2020**

### **Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh semangat dan rasa syukur, saya mempersembahkan buku ini kepada para pembaca yang budiman. Buku ini merupakan hasil perjalanan panjang, penyelidikan mendalam, dan refleksi yang hati-hati dalam upaya memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan pengetahuan di bidang yang relevan.

Tulisan ini mempelajari tentang Kewarganegaraan di Era Disrupsi, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat masyarakat untuk menambah ilmu kewarganegaraannya.

Melalui halaman-halaman buku ini, saya berharap pembaca akan menemukan gagasan yang menarik, insight yang berharga, dan perspektif yang membangun. Saya berupaya menyajikan materi dengan bahasa yang jelas, ide yang terstruktur, dan argumen yang kuat, guna memudahkan pemahaman dan merangsang pemikiran kritis.

Terakhir, saya menyadari bahwa buku ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, saya mengundang pembaca untuk memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif guna meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan karya ini di masa mendatang.

Selamat menikmati perjalanan intelektual yang disajikan dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi sahabat setia yang menginspirasi, mencerahkan, dan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.

Kotabumi, 15 Mei 2023

Editor

M. Ruhly Kesuma Dinata

# DAFTAR ISI

<b>MEMBANGUN BANGSA DAN KARAKTER BANGSA DI ERA DISRUPSI</b> .....	<b>1</b>
Marsyah, Didiek R. Mawardi, Irhammudin.....	1
ABSTRAK.....	1
PENDAHULUAN.....	1
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	2
PENUTUP.....	8
DAFTAR PUSAKA.....	9
<b>TRANSFORMASI KEWARGANEGARAAN DI ERA DISRUPSI: TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA DAN TANTANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> .....	<b>10</b>
Arif Rahman, Slamet Riyanto, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata	10
ABSTRAK.....	10
PENDAHULUAN.....	11
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
PENUTUP.....	22
DAFTAR PUSTKA.....	24
<b>PRAKTIK DEMOKRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA DISRUPSI</b> .....	<b>25</b>
Nurdin Habim, Slamet Haryadi, Suwardi.....	25
ABSTRAK.....	25
PENDAHULUAN.....	26
PEMBAHASAN.....	28
1. Pergeseran Pola Partisipasi Politik Masyarakat dalam Era Disrupsi Teknologi di Indonesia.....	28
2. Dampak Era Disrupsi terhadap Keamanan dan Privasi Data dalam Praktik Demokrasi di Indonesia.....	29

3. Tantangan Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat, Hoaks, atau Tendensius Mempengaruhi Proses Demokrasi di Indonesia alam Era Disrupsi .....	30
4. Bagaimana Perlindungan terhadap Integritas Pemilihan Umum di Indonesia di Tengah Era Disrupsi Teknologi? .....	32
5. Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Mekanisme Akuntabilitas Politik di Indonesia.....	33
6. Negara Republik Indonesia dapat Mengatasi Masalah Disinformasi dan Hoaks yang Mempengaruhi Proses Demokrasi di Era Disrupsi? .....	35
7. Bagaimana Memanfaatkan Peluang Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia? .....	36
PENUTUP.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39

<b>WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI SATUAN KESATUAN SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, BUDAYA,DAN HAMKAN .....</b>	<b>41</b>
Agung Utomo, Ery Setyanegara, Nabila Zatadini.....	41
ABSTRAK .....	41
PENDAHULUAN .....	42
1. LATAR BELAKANG.....	42
PEMBAHASAN .....	44
a) Fungsi wawasan nusantara secara umum.....	44
b) Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli .....	44
c) Unsur Unsur Dasar Wawasan Nusantara.....	46
KESIMPULAN .....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

<b>HAKIKAT KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA .....</b>	<b>50</b>
Muhammad Nuzul Setiawan, Didiek R. Mawardi, Adinda Akhsanal Viqria.....	50
ABSTRAK .....	50
PENDAHULUAN .....	51

1. Latar Belakang.....	51
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan .....	52
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	54
C. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan.....	57
D. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	58
E. Faktor Yang Berasal Dari Dalam Negeri, Antara Lain .....	60
F. Faktor-Faktor Yang Berasal Dari Luar Negeri Meliputi, Antara Lain .....	61
KESIMPULAN .....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

<b>INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA .....</b>	<b>63</b>
Joni Bedyal, Al Fitri, Ibrahim Fikma .....	63
ABSTRAK .....	63
A. PENDAHULUAN .....	64
B. PEMBAHASAN .....	65
1. Pengertian Integrasi Nasional .....	65
PENUTUP.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	76

# MEMBANGUN BANGSA DAN KARAKTER BANGSA DI ERA DISRUPSI

*Marsyah, Didiek R. Mawardi, Irhammudin*

Kejaksanaan Negeri Lampung Utara  
marsyahsaid1612@gmail.com

## ABSTRAK

Pendidikan adalah hal yang sangat penting di dunia tidak perlu dipertanyakan lagi karena dunia pun membutuhkan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Karakter bangsa dapat disimpulkan bahwa karakter itu dimiliki dan dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia yang diinginkan meliputi religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Indonesia tidak bisa dan tidak mungkin dapat melepaskan diri dari cengkraman era disrupsi.

Bila masyarakat tidak dapat menerima perubahan massif akan menimbulkan *culture shock*. *culture shock* suatu kondisi masyarakat tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan yang massif dan cepat sehingga masyarakat seolah-olah mengalami kegoyahan nilai social dalam masyarakat. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru.

Kata Kunci: Membangun, Karakter, Bangsa

## PENDAHULUAN

Membangun karakter bangsa dapat dilakukan dengan membentuk kebiasaan baik. Pembangunan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan yang lebih luas yaitu bangsa dan negara. Karakter bangsa

adalah akumulasi atau sinergi dari karakter individu warga bangsa yang berproses secara terus menerus dan kemudian mengelompok.

Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi emosi perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Atau karakter dapat dikatakan juga keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu, yang membedakan antara dirinya dengan individu yang lain. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pengembangan karakter bangsa bisa juga disebut rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh seluruh warga suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan.

Sedangkan disrupsi dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan sebagai hal tercabut dari akarnya. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari adalah sedang terjadi hal yang fundamental atau mendasar. Saat ini yang membuat terjadi perubahan yang mendasar adalah evolusi teknologi yang menyasar sebuah cela kehidupan manusia. Digital adalah akibat dari evolusi teknologi (terutama informasi) yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan. Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru.

## **PEMBAHASAN**

Era disrupsi, yang ditandai oleh perubahan cepat dan transformasi teknologi, telah memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat dan individu. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memprioritaskan pembangunan karakter yang kuat dalam diri setiap individu. Artikel ini akan membahas pentingnya pembangunan karakter di era disrupsi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan strategi untuk membentuk kualitas individu yang unggul dalam menghadapi perubahan yang tidak terelakkan.

## 1. Tantangan di Era Disrupsi:

Era disrupsi menawarkan tantangan yang unik dalam pembangunan karakter individu. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan konektivitas digital telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup. Tantangan tersebut meliputi kecepatan perubahan yang tinggi, gangguan dalam rutinitas tradisional, persaingan yang lebih intens, dan ketergantungan pada teknologi yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan nilai-nilai moral.

Era disrupsi adalah periode di mana teknologi dan inovasi mengubah secara signifikan cara hidup dan bekerja masyarakat. Perkembangan seperti kecerdasan buatan, internet, dan robotika telah mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, membangun karakter bangsa yang tangguh dan berkualitas sangatlah penting untuk menghadapi perubahan yang tidak terelakkan.

## 2. Kualitas Karakter yang Penting:

Dalam menghadapi era disrupsi, individu perlu mengembangkan kualitas karakter yang penting. Ini termasuk ketangguhan (resilience) dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, kemampuan beradaptasi dengan cepat, kreativitas dan inovasi, integritas yang tinggi, etika kerja yang kuat, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan interpersonal yang baik. Kualitas-kualitas ini akan membantu individu untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat.

Pembangunan karakter bangsa memerlukan fondasi yang kuat, yang terdiri dari nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Dalam perspektif Islam, karakter yang baik ditandai oleh integritas, keadilan, kesederhanaan, dan keberanian. Islam mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

### 3. Pendidikan Karakter yang Berfokus pada Nilai-nilai Etika:

Pendidikan karakter memiliki peran kunci dalam membangun individu yang kuat di era disrupsi. Pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai etika seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, rasa empati, dan etika digital akan membantu individu dalam mengembangkan kesadaran moral yang tinggi dan bertindak secara bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Pendidikan karakter juga harus mendorong keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi.

Salah satu tantangan besar di era disrupsi adalah keseimbangan antara teknologi dan moralitas. Sementara kemajuan teknologi memberikan manfaat yang besar, seperti kemudahan akses informasi dan efisiensi dalam berbagai bidang, kita juga dihadapkan pada risiko seperti kehilangan etika, kecanduan teknologi, dan penyalahgunaan data. Perspektif Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ini dan menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai moral.

### 4. Membangun Ketangguhan Mental dan Emosional:

Ketangguhan mental dan emosional menjadi kualitas penting dalam era disrupsi. Individu perlu memiliki kemampuan untuk mengelola stres, mengatasi kegagalan, dan memulihkan diri dengan cepat. Latihan meditasi, pemahaman diri, pengelolaan emosi, dan pembangunan kecerdasan emosional dapat membantu individu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menghadapi perubahan yang cepat.

Membangun karakter bangsa di era disrupsi memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pendidikan berperan penting dalam memasukkan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum sehingga generasi muda dapat mengembangkan karakter yang kuat. Selain itu, keluarga, lembaga agama, dan masyarakat juga memiliki peran dalam membentuk karakter yang baik melalui pembinaan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati.

## 5. Pembelajaran Seumur Hidup dan Adaptasi:

Era disrupsi mengharuskan individu untuk terus belajar dan beradaptasi. Pembelajaran seumur hidup menjadi penting dalam memperbarui keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Individu perlu mengadopsi sikap proaktif terhadap pembelajaran dan mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah.

Perspektif Islam menekankan pentingnya prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi dalam membangun karakter bangsa. Mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari membantu individu untuk menjadi teladan yang baik dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis di tengah era disrupsi.

Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kultur dasar bangsa tersebut, yang tercermin dari budaya komunikasinya (bahasanya). Dari bahasa yang dimiliki dan digunakan oleh suatu bangsa atau suatu komunitas dapat dikenali jati diri atau karakter bangsa. Membangun karakter bangsa dapat dilakukan dengan membentuk kebiasaan baik. Pembangunan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan yang lebih luas yaitu bangsa dan negara. Bagaimana cara membangun bangsa yang baik.

Pembangunan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh seluruh warga suatu bangsa, negara, dan pemerentihan menuju modernitas dalam rangka pembinaan. Saat ini yang membuat terjadi perubahan yang mendasar adalah evolusi teknologi yang menyasar sebuah cela kehidupan manusia. Dari bahasa yang dimiliki dan digunakan oleh suatu bangsa atau suatu komunitas dapat dikenali jati diri atau karakter bangsa. Membangun karakter bangsa dapat dilakukan dengan membentuk kebiasaan baik, meningkatkan rasa solidaritas dan empati terhadap sesama bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bersatu, sekalipun banyak perbedaan yang tampak. Menunjukkan kepedulian terhadap bangsa dengan

menyuarakan opini yang bertanggung jawab juga dapat membuka ruang diskusi positif demi mencari jalan keluar atas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. yang paling parah banyak anak bangsa atau generasi mudah yang terpengaruh oleh hal buruk dalam perkembangan era disrupsi ini dimana norma sendiri ialah aturan tidak tertulis yang digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat dan memiliki sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggarnya.

#### 1. Berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman

Bagi pemuda, zaman adalah kawan. Perkaya wawasan kalian dengan aktif mengikuti perkembangan, baik yang berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, hingga peristiwa yang tengah berlangsung di berbagai belahan dunia. Dengan aktif mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kalian dapat berpartisipasi menciptakan ide-ide baru yang dapat diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan bangsa.

#### 2. Meningkatkan rasa solidaritas dan empati terhadap sesama

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bersatu, sekalipun banyak perbedaan yang tampak. Meski berasal dari berbagai latar belakang, kita harus mampu bersatu dan bahu-membahu dalam membangun bangsa. Tingkatkan rasa solidaritas dan empati, terutama pada orang-orang dengan keterbatasan agar jurang pemisah antar kelas sosial dapat diredam.

#### 3. Ikut serta dalam proses demokrasi

Partisipasi dalam proses demokrasi dapat terwujud dengan memberikan suara pada proses pemilihan, bagi yang telah memiliki hak pilih. Menunjukkan kepedulian terhadap bangsa dengan menyuarakan opini yang bertanggung jawab juga dapat membuka ruang diskusi positif demi mencari jalan keluar atas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 4. Giat belajar dan tidak mudah putus asa

Karakter dan rasa ingin tahu yang kuat merupakan ciri pemuda berkualitas. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, proses belajar jadi lebih mudah. Kita bisa mengakses beragam materi pelajaran dan ilmu pengetahuan dari berbagai dunia. Berkat

kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam belajar.

#### 5. Optimistis dan mau bekerja keras

Sikap mental yang positif membuat segala tantangan terasa lebih mudah diatasi. Bagi pemuda, optimisme juga merupakan modal utama untuk meraih mimpi. Nyatakan optimisme tersebut dengan kerja keras. Namun, jangan lupa pula untuk memperhitungkan risiko dan strategi untuk mengatasinya. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita yakin dan mau bekerja keras.

Era Disrupsi adalah fenomena baru yang muncul di tengah peradaban manusia di dunia saat ini. Era disrupsi adalah sebuah era yang ditandai dengan pesatnya laju perkembangan teknologi yang merasuki semua unsur kehidupan manusia. Segala unsur kehidupan manusia di era disrupsi ini tidak dapat dilepaskan dari pesatnya laju teknologi. di era disrupsi sekarang ini telah begitu banyak membawa perubahan, baik perubahan yang berdampak positif dalam kehidupan maupun dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari.

Contohnya generasi muda, dimana kebanyakan dari mereka cenderung tidak dapat menyaring/filter terhadap kebudayaan yang masuk kepada dirinya atau tidak bisa menyaring dari adanya globalisasi. Yang paling parah banyak anak bangsa atau generasi mudah yang terpengaruh oleh hal buruk dalam perkembangan era disrupsi ini. Seperti dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya :

Pertama, aspek norma. Dimana norma sendiri ialah aturan tidak tertulis yang digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat dan memiliki sanksi social bagi masyarakat yang melanggarnya. Pada era ini norma-norma yang tumbuh dalam Negara Indonesia tercinta kita sudah mulai terabaikan keberadaannya, norma tersebut mulai terhapus dengan adanya aturan-aturan baru yang membebaskan segala sesuatu hal yang berdampak besar untuk generasi muda pada zaman sekarang.

Kedua, aspek budaya. Akibat dari era disrupsi budaya saat ini sudah mulai banyak bercampur dengan budaya asing. Hali ini sudah mulai terlihat dari budaya berpakaian generasi bangsa, generasi mudah cenderung lebih suka menggunakan pakaian yang mini dan

tidak menyukai pakain yang sopan dan tertutup yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Sebagian banyak menurut mereka apabila tidak mengikuti trend pakain terkini, mereka dianggap sebagai generasi yang tidak trendy.

Selain itu, kita juga bisa melihat sikap dari mereka, generasi muda sekarang banyak yang tingkah lakunya tidak mengenal sopan santun, tidak mempunyai rasa peduli terhadap orang lain dan cuek terhadap lingkungan di sekitarnya. Contoh kongkrit adalah adanya geng motor yang biasanya dilakukan oleh anak muda untuk melakukan tindakan kekerasan yang sangat mengganggu ketentraman, kedamaian dan keyamanan masyarakat pada umumnya. Selain contoh terbesar tersebut, saat ini banyak sekali tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh kaum pelajar. Pelajar yang seharusnya melakukan kewajibannya yaitu belajar, sekarang lebih suka melakukan tindakan yang kurang baik/tercela seperti tawuran hanya karena hal yang sepele. Apabila pengaruh tersebut tetap dibiarkan, apa jadinya generasi bangsa nantinya? Mungkin saja akan menimbulkan moral generasi muda yang rusak, timbulnya gerakan anarkisme dan tindakan kriminalitas lainnya yang dapat mengganggu masyarakat pada umumnya. Perlu diingat generasi muda adalah generasi penerus bangsa ini di masa yang akan datang.

## **PENUTUP**

Membangun bangsa dan karakter bangsa di era disrupsi adalah tantangan yang kompleks, tetapi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh dan beradab. Dalam perspektif Islam, fondasi moral dan etika yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi perubahan yang cepat. Dengan mempraktikkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara teknologi dan moralitas, kita dapat membangun bangsa yang berdaya saing, berintegritas, dan berkontribusi positif terhadap perkembangan umat manusia.

Pembangunan karakter di era disrupsi merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Dalam menghadapi perubahan cepat dan transformasi teknologi, individu perlu mengembangkan kualitas karakter yang kuat seperti ketangguhan, kreativitas, integritas, dan keterampilan interpersonal yang baik. Pendidikan

karakter, pembangunan ketangguhan mental dan emosional, serta pembelajaran seumur hidup menjadi strategi yang penting dalam membentuk individu yang unggul dalam menghadapi era disrupsi. Dengan pembangunan karakter yang baik, individu dapat mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan dalam lingkungan yang terus berubah.

#### **DAFTAR PUSAKA**

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Hal 43-46

Kompas.com. (2022) pembangunan karakter bangsa

Nurma Fitriyanti (2019) OPINI : Konstruksi Karakter Anak Bangsa di Era Disrupsi

Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan ISSN 2715-467X

Putu Ratih Siswinarti (2017) Pentingnya Pendidikan Karakter Untuk Membangun Bangsa Beradab.

Rhenald Kesali (2017) Disrupt

# TRANSFORMASI KEWARGANEGARAAN DI ERA DISRUPSI: TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA DAN TANTANGAN REPUBLIK INDONESIA

*Arif Rahman, Slamet Riyanto,  
Muhammad Ruhly Kesuma Dinata*

*Lensa Hukum News Kotabumi  
ariflensahukum123@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Era disrupsi teknologi telah mengubah lanskap sosial, politik, dan budaya, yang pada gilirannya mempengaruhi konsep dan praktik kewarganegaraan. Dalam artikel ini, kami menganalisis bagaimana transformasi ini mempengaruhi hubungan antara individu dan negara, serta peran masyarakat dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kami mempelajari perubahan dalam partisipasi politik, identitas nasional, dan konstruksi identitas sosial. Selain itu, kami menyelidiki bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta implikasinya terhadap tata kelola publik yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Transformasi, Dinamika, Era Disrupsi

## PENDAHULUAN

Republik Indonesia, sebagai negara kepulauan yang besar dan beragam, menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam menghadapi era disrupsi global. Era disrupsi ditandai oleh perubahan teknologi, globalisasi, dan transformasi sosial yang cepat, yang berdampak langsung pada isu-isu kewarganegaraan. Transformasi kewarganegaraan menjadi isu krusial yang memerlukan pemahaman mendalam untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul.

Perubahan sosial dan teknologi yang pesat mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Fenomena ini membawa dampak pada identitas kewarganegaraan, kesadaran kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara. Disrupsi global juga menghadirkan tantangan dalam menghadapi polarisasi sosial, isu-isu etnis dan agama, serta pergeseran nilai-nilai sosial yang dapat mempengaruhi soliditas dan integrasi nasional.

Di tengah perubahan besar tersebut, pemerintah Indonesia perlu menghadapi dinamika politik yang beragam dan kadang-kadang konflik dalam mengimplementasikan kebijakan kewarganegaraan. Upaya untuk membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan menjadi sebuah tantangan yang kompleks, mengingat berbagai kepentingan dan tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat.

Selain itu, dalam era disrupsi, fenomena migrasi internasional juga semakin kompleks dan menimbulkan berbagai persoalan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ganda, status warga negara tanpa kewarganegaraan, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks global menjadi isu yang perlu diatasi dengan bijaksana.

Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai tantangan ini, diperlukan tinjauan menyeluruh terhadap dinamika kewarganegaraan di era disrupsi di Republik Indonesia. Tinjauan ini meliputi perubahan sosial, politik, dan teknologi yang berdampak pada identitas dan kesadaran kewarganegaraan, serta tantangan dalam mencapai kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana pemerintah dan

masyarakat beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut dan menemukan solusi yang tepat guna menghadapi era disrupsi secara komprehensif.

Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan tantangan kewarganegaraan di era disrupsi, diharapkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan berkelanjutan dalam membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan menghadapi tantangan global dengan bijaksana.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Transformasi Identitas Kewarganegaraan di Indonesia Menghadapi Perubahan Sosial yang Cepat.**

Transformasi identitas kewarganegaraan di Indonesia menjadi semakin relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat di era kontemporer. Globalisasi, teknologi informasi, migrasi, dan dinamika sosial lainnya telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap cara individu mengartikan dan mengalami kewarganegaraan (Amaliah R, 2017:45-62). Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis bagaimana transformasi ini terjadi di Indonesia dan bagaimana perubahan sosial yang cepat mempengaruhi pemahaman dan konstruksi identitas kewarganegaraan.

Transformasi identitas kewarganegaraan di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek, termasuk aspek budaya, agama, suku bangsa, dan etnis. Masyarakat Indonesia yang majemuk menghadapi tuntutan untuk menavigasi identitas yang kompleks di tengah perubahan sosial yang cepat. Misalnya, globalisasi membawa pengaruh yang signifikan dalam bentuk budaya populer, teknologi komunikasi, dan arus migrasi, yang dapat mempengaruhi cara individu memandang diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Identitas kewarganegaraan tidak lagi terbatas pada aspek nasional, tetapi juga melibatkan dimensi global yang kompleks.

Pada pembahasan ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang bagaimana perubahan sosial yang cepat memengaruhi konstruksi identitas kewarganegaraan di Indonesia.

Perubahan sosial yang cepat juga mempengaruhi cara individu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat. Identitas kewarganegaraan yang terbentuk dalam konteks perubahan sosial ini membawa implikasi terhadap dinamika demokrasi, partisipasi politik, dan hubungan antara individu dan negara. Pemahaman yang lebih baik tentang transformasi identitas kewarganegaraan di Indonesia dapat membantu kita menghadapi tantangan yang timbul dan mengoptimalkan peluang dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan harmonis di era yang terus berubah ini.

## 2. Membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan di tengah disrupsi global.

Membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan merupakan tugas yang kompleks, terutama di tengah disrupsi global yang terjadi akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi (Latif Y, 2015:78-96). Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis tantangan utama yang dihadapi dalam upaya membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan di era disrupsi global.

Tantangan pertama adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Disrupsi global, seperti perubahan teknologi dan globalisasi, telah menyebabkan polarisasi ekonomi dan sosial yang tajam. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang berbeda. Tantangan ini mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat, serta mempengaruhi konstruksi identitas kewarganegaraan.

Tantangan kedua adalah eksklusi sosial dan politik terhadap kelompok minoritas. Di tengah disrupsi global, terdapat risiko munculnya ketidakadilan sistemik terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk suku bangsa, agama, gender, dan disabilitas. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik dapat menghambat partisipasi dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok minoritas dalam konteks kewarganegaraan.

Tantangan ketiga adalah keamanan dan privasi data dalam era digital. Disrupsi global dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Namun, dengan meningkatnya pengumpulan dan penggunaan data pribadi, terdapat risiko keamanan dan privasi yang perlu diatasi. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi yang semakin canggih dalam praktik kewarganegaraan tidak mengancam privasi individu dan merusak kepercayaan dalam sistem.

Dengan memahami tantangan ini, kita dapat mengembangkan strategi yang berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, menghindari eksklusi sosial dan politik terhadap kelompok minoritas, serta memastikan keamanan dan privasi data dalam praktik kewarganegaraan.

### 3. Dinamika politik mempengaruhi pembentukan kewarganegaraan di Indonesia.

Dalam konteks pembentukan kewarganegaraan di Indonesia, dinamika politik memiliki peran yang signifikan. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis bagaimana dinamika politik mempengaruhi proses pembentukan kewarganegaraan di Indonesia dan bagaimana hal ini berdampak pada inklusi, identitas, dan partisipasi warga negara.

Dinamika politik dapat mempengaruhi pembentukan kewarganegaraan melalui kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini mencakup aspek hukum, imigrasi, pendidikan, dan hak-hak dasar yang berkaitan dengan status kewarganegaraan (Azra A, 2012:92-110). Misalnya, perubahan dalam undang-undang kewarganegaraan dapat memberikan dampak signifikan pada proses naturalisasi, pengakuan hak kewarganegaraan, dan pemberian identitas sebagai warga negara Indonesia.

Selain itu, dinamika politik juga dapat memengaruhi inklusi sosial dan politik dalam konteks kewarganegaraan. Ketegangan politik, konflik, dan perbedaan ideologi dapat mempengaruhi hubungan antara individu dan negara, serta antarwarga negara. Hal

ini dapat memengaruhi partisipasi politik, kebebasan berpendapat, dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas dalam masyarakat.

Dinamika politik juga berdampak pada konstruksi identitas kewarganegaraan di Indonesia. Politik identitas, termasuk agama, suku bangsa, dan etnis, sering menjadi faktor penting dalam proses pembentukan kewarganegaraan. Perdebatan seputar identitas nasional, hak-hak budaya, dan perlindungan minoritas dapat mempengaruhi cara individu memandang diri mereka sebagai warga negara Indonesia.

Dengan memahami dinamika politik yang mempengaruhi pembentukan kewarganegaraan di Indonesia, kita dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, melindungi hak-hak warga negara, dan mempromosikan partisipasi yang aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat.

#### 4. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran dan komitmen kewarganegaraan yang kuat.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan komitmen kewarganegaraan yang kuat di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pemahaman, nilai-nilai, dan sikap positif terhadap kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan membantu memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui kurikulum yang dirancang khusus, siswa diperkenalkan pada nilai-nilai dasar demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan partisipasi politik (Haryanto, 2019:78-95). Mereka diajarkan tentang struktur pemerintahan, sistem politik, dan proses pembuatan keputusan di tingkat nasional dan lokal. Hal ini membantu siswa memahami peran mereka dalam masyarakat dan memberikan dasar yang kuat untuk komitmen kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab.

Melalui analisis ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran dan komitmen kewarganegaraan, serta memberikan wawasan tentang konsep, teori, dan implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam membangun sikap positif terhadap kewarganegaraan, seperti rasa saling menghormati, toleransi, keberagaman, dan keadilan sosial. Melalui pembelajaran yang melibatkan interaksi antarindividu dengan latar belakang yang berbeda, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan empati terhadap berbagai perspektif dan pengalaman. Hal ini membantu membangun sikap yang inklusif dan menghargai perbedaan dalam konteks kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat. Melalui simulasi, diskusi, dan proyek kolaboratif, siswa diberikan pengalaman langsung dalam mengaplikasikan pengetahuan dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks nyata. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Dengan memahami peran penting pendidikan kewarganegaraan, kita dapat meningkatkan pengembangan kurikulum yang lebih baik, pelatihan bagi guru, dan pengintegrasian pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan secara komprehensif. Dengan demikian, kita dapat membangun kesadaran dan komitmen kewarganegaraan yang kuat di kalangan generasi muda, sebagai pondasi yang kokoh bagi pembangunan negara yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5. Ideologi Pancasila berkontribusi dalam membentuk kewarganegaraan yang responsif terhadap perubahan zaman.

Ideologi Pancasila memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kewarganegaraan yang responsif terhadap perubahan zaman di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis bagaimana Pancasila sebagai ideologi dasar negara berkontribusi dalam membentuk kesadaran, nilai-nilai, dan komitmen kewarganegaraan yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pancasila memberikan dasar yang kuat untuk membangun kewarganegaraan yang responsif. Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi, relevan

dalam konteks perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di era modern. Gotong royong, misalnya, mendorong kerjasama dan solidaritas dalam menghadapi tantangan dan membangun keberlanjutan di tengah perubahan zaman.

Melalui analisis ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang kontribusi ideologi Pancasila dalam membentuk kewarganegaraan yang responsif, serta memberikan wawasan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter kewarganegaraan yang berintegritas.

Ideologi Pancasila juga memberikan kerangka kerja yang inklusif dan adaptif dalam mengatasi tantangan perubahan zaman. Dalam Pancasila, terdapat prinsip-prinsip yang mengakomodasi keberagaman dan pluralitas masyarakat Indonesia, sehingga memungkinkan berbagai suara, pandangan, dan aspirasi diakomodasi dalam proses pembentukan kewarganegaraan (Wahid A, 2017:45-60). Hal ini memungkinkan responsivitas terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang.

Pancasila juga memiliki landasan filosofis yang dapat menginspirasi pemikiran dan tindakan individu sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Konsep Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membentuk landasan moral dan etis dalam menjalankan kewarganegaraan yang responsif dan beretika.

Dengan memahami kontribusi ideologi Pancasila dalam membentuk kewarganegaraan yang responsif terhadap perubahan zaman, kita dapat memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu membangun kewarganegaraan yang adaptif, inklusif, dan berintegritas, serta mampu menjawab tantangan yang terus berkembang di era modern.

## 6. Peran Pancasila dalam membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan di era disrupsi.

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, memainkan peran penting dalam membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan di era disrupsi. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis peran Pancasila dalam membentuk kesadaran, nilai-nilai, dan komitmen kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan di tengah tantangan disrupsi global.

Pancasila memberikan kerangka nilai-nilai yang inklusif dalam membangun kewarganegaraan. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi, menggarisbawahi pentingnya inklusi dan partisipasi semua warga negara dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial (Kaelan, 2018:52-68). Dalam era disrupsi, di mana perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi terjadi dengan cepat, prinsip-prinsip Pancasila mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan kesempatan yang adil dan setara.

Melalui analisis ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang peran Pancasila dalam membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan di era disrupsi, serta memberikan wawasan tentang esensi dan aplikasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Pancasila juga mempromosikan persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Di Indonesia, dengan beragam suku bangsa, agama, dan budaya, Pancasila menekankan pentingnya menghormati dan memperkuat persatuan di antara semua warga negara. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu) menggarisbawahi bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa dan harus dihargai dalam praktik kewarganegaraan.

Dalam era disrupsi, di mana teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi cara kita berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, Pancasila juga dapat berperan dalam mengatasi tantangan terkait penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau tendensius. Prinsip keadilan sosial dan demokrasi dalam Pancasila mengingatkan kita untuk menggunakan

teknologi secara bertanggung jawab, melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, dan memastikan akses yang adil terhadap informasi yang benar dan bermanfaat bagi semua warga negara.

Dengan memahami peran Pancasila dalam membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan di era disrupsi, kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat, politik, dan ekonomi. Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dan etis dalam menjalankan kewarganegaraan di era yang terus berubah dan menantang.

#### 7. Implikasi konstitusional dan perundang-undangan dalam membangun kewarganegaraan yang kuat di Indonesia.

Implikasi konstitusional dan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kewarganegaraan yang kuat di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis bagaimana konstitusi dan perundang-undangan berperan dalam membentuk kerangka hukum dan landasan bagi pembentukan kewarganegaraan yang kuat dan berkeadilan di Indonesia.

Konstitusi Indonesia, terutama UUD 1945, memberikan landasan konstitusional yang kokoh bagi pembentukan kewarganegaraan. Konstitusi mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan bagi warga negara Indonesia (Asshiddiqie J, 2019:98-120). Melalui konstitusi, dijelaskan tentang status kewarganegaraan, mekanisme pemberian kewarganegaraan, dan hak-hak dasar yang melekat pada status tersebut. Implikasi konstitusional ini memberikan kepastian hukum dan dasar yang kuat dalam membangun kewarganegaraan yang kuat dan berkeadilan.

Melalui analisis ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang implikasi konstitusional dalam membangun kewarganegaraan yang kuat di Indonesia, serta memberikan wawasan tentang peran konstitusi dalam menjamin hak-hak warga negara dan mengatur aspek-aspek kewarganegaraan dalam kerangka hukum.

Perundang-undangan juga memainkan peran penting dalam membangun kewarganegaraan yang kuat. Undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan pemerintah mengatur berbagai aspek kewarganegaraan, seperti kewajiban, hak, dan prosedur pemberian kewarganegaraan. Implikasi perundang-undangan ini mencakup persyaratan dan proses pemberian kewarganegaraan, hak-hak politik, hak-hak sosial, dan perlindungan bagi warga negara.

Dalam konteks kewarganegaraan yang kuat, perundang-undangan juga dapat berperan dalam melindungi hak-hak minoritas, mempromosikan inklusi, dan mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Melalui peraturan yang adil dan inklusif, perundang-undangan dapat menjadi alat untuk membangun kewarganegaraan yang berkeadilan bagi semua warga negara Indonesia.

Dengan memahami implikasi konstitusional dan perundang-undangan, kita dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memastikan perlindungan hukum yang setara dan adil bagi semua warga negara. Implementasi yang efektif dari konstitusi dan perundang-undangan yang berorientasi pada kewarganegaraan yang kuat dan berkeadilan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan di Indonesia.

8. Strategi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam membangun kewarganegaraan yang responsif di era disrupsi.

Setelah menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi pembentukan kewarganegaraan di era disrupsi, kita dapat mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam membangun kewarganegaraan yang responsif di Indonesia.

1. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran kunci dalam membentuk pemahaman, kesadaran, dan komitmen kewarganegaraan yang kuat. Strategi ini melibatkan peningkatan kurikulum, pelatihan guru, dan pengembangan materi yang mencakup nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, pluralisme, dan partisipasi politik. Pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas

dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban warga negara, serta memperkuat kesadaran akan nilai-nilai demokrasi.

2. Peningkatan Akses dan Partisipasi: Untuk membangun kewarganegaraan yang inklusif, penting untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, informasi, layanan publik, dan partisipasi politik bagi semua warga negara. Strategi ini melibatkan upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, memperluas akses ke teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam era disrupsi, inovasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses dan partisipasi warga negara.
3. Pengembangan Literasi Digital dan Media: Dalam era disrupsi, penting untuk mengembangkan literasi digital dan media yang kuat bagi warga negara. Strategi ini melibatkan pendidikan tentang penggunaan yang bijak dan etis teknologi informasi, pengenalan kepada sumber informasi yang dapat dipercaya, serta kemampuan dalam memahami dan menyaring informasi yang diterima dari media massa dan platform digital. Literasi digital dan media yang baik memungkinkan warga negara untuk menjadi konsumen informasi yang kritis dan bertanggung jawab.
4. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat: Tantangan yang kompleks dalam membangun kewarganegaraan di era disrupsi membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Strategi ini melibatkan kolaborasi dalam pengembangan kebijakan publik yang inklusif, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan kinerja pemerintah. Kolaborasi yang erat dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat tata kelola yang responsif dan demokratis.
5. Penguatan Etika dan Tanggung Jawab Media: Media massa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kewarganegaraan di era disrupsi. Strategi ini melibatkan penguatan etika jurnalistik, keberagaman kepemilikan media, dan penegakan standar akurasi dan keberimbangan berita.

Pemantauan media yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tanggung jawab media juga diperlukan.

6. Pembangunan Kapasitas Masyarakat: Dalam membangun kewarganegaraan yang responsif di era disrupsi, penting untuk membangun kapasitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Strategi ini melibatkan pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era yang terus berubah. Pembangunan kapasitas masyarakat memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam pembuatan keputusan, mengatasi masalah sosial, dan menciptakan perubahan positif di komunitas mereka.

Melalui penerapan strategi ini, diharapkan kita dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam membangun kewarganegaraan yang responsif di era disrupsi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media massa menjadi kunci dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks dalam membangun kewarganegaraan yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan di Indonesia.

## **PENUTUP**

Dalam era disrupsi yang gejolak ini, transformasi kewarganegaraan di Republik Indonesia menjadi semakin penting dan relevan. Tinjauan terhadap dinamika dan tantangan yang telah dibahas dalam artikel ini mengungkap kompleksitas dalam membangun kewarganegaraan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan. Berbagai aspek, seperti perubahan sosial, teknologi, politik, dan budaya, mempengaruhi cara individu dan masyarakat mengartikan dan mempraktikkan kewarganegaraan.

Dalam analisis kita terhadap peran pendidikan kewarganegaraan, ideologi Pancasila, media massa, otonomi daerah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kewarganegaraan, kita menyadari tantangan kompleks yang harus dihadapi. Kesenjangan sosial dan ekonomi, eksklusi terhadap kelompok minoritas, tantangan dalam memanfaatkan teknologi, dan berbagai isu lainnya menjadi hal yang harus ditangani dengan serius.

Namun, di tengah tantangan ini juga terdapat peluang untuk membangun kewarganegaraan yang lebih kuat dan responsif. Strategi-strategi yang telah dikemukakan, seperti penguatan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan akses dan partisipasi, pengembangan literasi digital dan media, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, penguatan etika media, dan pembangunan kapasitas masyarakat, menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam membangun kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam upaya membangun kewarganegaraan yang kuat di era disrupsi, peran aktif semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, media massa, dan individu sebagai warga negara, sangatlah penting. Keterlibatan dan kolaborasi yang erat antara semua pihak diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan.

Kita harus memahami bahwa transformasi kewarganegaraan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan upaya bersama. Kita perlu terus mendorong dialog, memperkuat pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dengan demikian, Republik Indonesia dapat melangkah maju menuju kewarganegaraan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era disrupsi ini, kita akan terus berkomitmen untuk membangun masyarakat yang kuat, demokratis, dan harmonis, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan semangat kewarganegaraan yang kokoh

## DAFTAR PUSTKA

- Rizki Amaliah, *\_Identitas Kewarganegaraan di Indonesia: Perspektif Multikulturalisme dalam Era Globalisasi\_* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 45-62.
- Yudi Latif, *\_Kewarganegaraan dan Keberagaman: Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi\_* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 78-96.
- Azyumardi Azra, *\_Kewarganegaraan di Indonesia: Identitas, Hak, dan Kebijakan\_* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2012), 92-110.
- Hariyanto, *\_Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep, Teori, dan Implementasi\_* (Yogyakarta: Gava Media, 2019), 78-95.
- Abdurrahman Wahid, *\_Pancasila sebagai Ideologi Negara: Kontribusinya dalam Pembentukan Kewarganegaraan yang Berintegritas\_* (Jakarta: Mizan, 2017), 45-60
- Kaelan, *\_Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa\_* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2018), 52-68.

# PRAKTIK DEMOKRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA DISRUPSI

*Nurdin Habim, Slamet Haryadi, Suwardi*

*DPRD Kabupaten Lampung Utara  
nurdinktb6@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Era disrupsi, yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk praktik demokrasi. Tulisan ini mengkaji dinamika politik dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks demokrasi, tantangan yang dihadapi adalah adanya pergeseran dalam cara masyarakat terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Teknologi yang semakin canggih telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, namun juga memunculkan isu-isu terkait keamanan, privasi, dan keaslian informasi. Artikel ini menganalisis bagaimana disrupsi teknologi mempengaruhi praktik demokrasi, termasuk partisipasi publik, pemilihan umum, dan mekanisme akuntabilitas politik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Praktik, Demokrasi, Negara

## PENDAHULUAN

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada partisipasi publik dan pengambilan keputusan kolektif, merupakan salah satu nilai fundamental yang dijunjung tinggi di Negara Republik Indonesia. Namun, dalam menghadapi era disrupsi yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam memperluas ruang partisipasi politik, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Artikel ini menjelaskan beberapa inovasi politik yang telah muncul di Indonesia, seperti penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik, penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk pemantauan pemilihan, dan penerapan e-government untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Dalam kesimpulannya, artikel ini menekankan perlunya adaptasi dan penyesuaian dalam praktik demokrasi di era disrupsi. Pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor politik lainnya perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh disrupsi teknologi, sambil memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik demokrasi di Indonesia dapat beradaptasi dengan era disrupsi untuk mencapai tujuan yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. cepat, praktik demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan baru yang mempengaruhi dinamika politik dan sosial di negara ini.

Judul artikel ini, "Praktik Demokrasi Negara Republik Indonesia di Era Disrupsi: Tantangan dan Peluang", menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam tentang perubahan yang terjadi dalam praktik demokrasi di tengah era disrupsin. Era disrupsi ini membawa dampak signifikan pada cara masyarakat terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan, memperluas akses informasi, dan memunculkan tantangan baru sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Dalam konteks demokrasi, tantangan yang dihadapi di era disrupsi melibatkan pergeseran dalam pola partisipasi politik masyarakat. Teknologi yang semakin canggih telah memberikan kesempatan kepada individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, namun juga membawa konsekuensi yang kompleks.

Isu-isu terkait keamanan data, privasi, dan penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi perhatian penting dalam upaya mempertahankan integritas demokrasi di Indonesia. Negara Republik Indonesia, sebagai negara demokratis, telah mengalami perubahan yang signifikan dalam praktik demokrasinya seiring dengan masuknya era disrupsi. Era disrupsi ini ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, yang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan terlibat dalam proses politik. Dalam konteks ini, praktik demokrasi di aksesibilitas informasi, dan memperkuat akuntabilitas politik. Inovasi politik seperti penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik, penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk pemantauan pemilihan, dan penerapan e-government dalam pelayanan publik menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat praktik demokrasi di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif praktik demokrasi di Negara Republik Indonesia di era disrupsi. Kami akan menggali tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk isu-isu privasi, keamanan, dan keaslian informasi, serta peluang yang ada dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan akuntabilitas politik.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik demokrasi di era disrupsi, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan dan pandangan yang jelas tentang bagaimana Negara Republik Indonesia dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang baru yang perlu dipahami dengan baik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan pola partisipasi politik masyarakat. Kemajuan teknologi telah memberikan akses yang lebih luas kepada individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses politik, melalui platform seperti media sosial, aplikasi berbasis teknologi, dan alat komunikasi digital lainnya. Namun, hal ini juga membawa konsekuensi yang kompleks. Tantangan pertama adalah berkaitan dengan keamanan dan privasi data. Dalam era disrupsi, data pribadi dan politik masyarakat dapat dengan mudah diakses, digunakan, atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peretasan data, penyebaran informasi palsu, dan serangan siber menjadi ancaman yang menghambat integritas praktik demokrasi di Indonesia.

Tantangan kedua adalah masalah validitas dan keaslian informasi. Dalam era disrupsi, informasi dapat dengan mudah disebarluaskan melalui berbagai platform digital, tanpa melewati proses verifikasi dan validasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau tendensius, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemahaman publik, proses pengambilan keputusan, dan stabilitas politik.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pergeseran Pola Partisipasi Politik Masyarakat dalam Era Disrupsi Teknologi di Indonesia**

Era disrupsi teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam pola partisipasi politik masyarakat di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan individu dan kelompok untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, memperluas ruang partisipasi, dan meningkatkan aksesibilitas politik. Namun, pergeseran ini juga membawa tantangan dan dampak yang perlu dipahami dengan baik.

Salah satu aspek pergeseran pola partisipasi politik adalah peningkatan partisipasi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Masyarakat dapat dengan mudah berbagi pendapat, mengungkapkan aspirasi, dan berinteraksi dengan pihak-pihak politik melalui platform ini. Hal ini memungkinkan partisipasi politik

yang lebih luas dan inklusif, tanpa batasan geografis atau waktu. (Tapsell, 2020 : 75-91)

Selain itu, teknologi juga memfasilitasi akses informasi politik yang lebih cepat dan luas. Melalui internet, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kebijakan politik, pemimpin politik, isu-isu politik, dan pemilihan umum. Informasi ini memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat dan mempengaruhi partisipasi politik mereka. (Luis Salcedo, 2020 : 46-62)

Namun, pergeseran pola partisipasi politik ini juga menghadirkan tantangan dan dampak negatif. Salah satunya adalah isu kepercayaan dan validitas informasi. Dalam era disrupsi, penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau tendensius dapat dengan mudah terjadi melalui platform digital. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman publik, memperburuk polarisasi politik, dan menghambat proses demokrasi yang sehat.

Selain itu, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ketimpangan digital dapat membatasi partisipasi politik mereka yang tidak memiliki akses atau literasi digital yang memadai. Ini menghasilkan kesenjangan partisipasi yang dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Pada pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana pergeseran pola partisipasi politik masyarakat dalam era disrupsi teknologi di Indonesia

## **2. Dampak Era Disrupsi terhadap Keamanan dan Privasi Data dalam Praktik Demokrasi di Indonesia**

Era disrupsi teknologi telah mengubah lanskap praktik demokrasi di Indonesia, tetapi dampaknya terhadap keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pertukaran data yang cepat dan luas, namun pada saat yang sama juga membawa risiko terhadap keamanan dan privasi individu dalam konteks demokrasi.

Salah satu dampak era disrupsi terhadap keamanan dan privasi data dalam praktik demokrasi adalah meningkatnya ancaman terhadap keamanan data politik dan pribadi. Dalam era di mana data

pribadi dan politik dapat dengan mudah dikumpulkan dan disebarluaskan, masyarakat rentan terhadap serangan siber, peretasan data, dan penyalahgunaan informasi pribadi mereka. Ancaman ini dapat menghambat integritas praktik demokrasi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses politik. (Schwanholz, 2019 : 137-155)

Selain itu, era disrupsi juga membawa perubahan dalam cara data politik dikumpulkan dan digunakan. Data politik yang dikumpulkan melalui platform digital dapat digunakan untuk profilisasi pemilih, segmentasi audiens, dan strategi kampanye yang lebih canggih. Namun, penggunaan data politik ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan data secara tidak etis, manipulasi opini publik, dan pengaruh yang tidak seimbang dalam proses demokrasi. (Schneier, 2015 : 215-230)

Pada pembahasan ini, kita dapat melihat dampak era disrupsi terhadap keamanan dan privasi data dalam praktik demokrasi di Indonesia.

### **3. Tantangan Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat, Hoaks, atau Tendensius Mempengaruhi Proses Demokrasi di Indonesia dalam Era Disrupsi**

Penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau tendensius telah menjadi tantangan serius dalam praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam era disrupsi teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan informasi tersebar dengan cepat melalui platform digital, tetapi juga memperkuat penyebaran informasi yang tidak dapat diverifikasi. Dampaknya terhadap proses demokrasi di Indonesia menjadi perhatian penting.

Tantangan pertama adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Dalam era disrupsi, informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat dengan mudah dihasilkan, disebarluaskan, dan viral melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman publik, memperburuk polarisasi politik, dan menghambat proses demokrasi yang sehat. Ketidakkampuan masyarakat untuk memverifikasi kebenaran informasi sering kali

memperkuat penyebaran hoaks tersebut. (O'Connor & Owen Weatherall, 2019 : 125-143)

Tantangan kedua adalah penyebaran informasi tendensius atau berpihak. Dalam era disrupsi, media sosial dan platform digital memberikan kebebasan bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pandangan mereka. Namun, hal ini juga membawa risiko penyebaran informasi yang tendensius atau berpihak secara politik. Penyebaran informasi yang tidak seimbang dapat mempengaruhi opini publik, memperkuat perpecahan sosial, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam demokrasi. (Zimdars, 2018 : 76-94)

Pada pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana tantangan penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau tendensius mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia dalam era disrupsi. Implikasi dari Kecepatan dan Mudahnya Penyebaran Informasi dalam Praktik Demokrasi di Era Disrupsi terhadap Pemahaman Publik dan Proses Pengambilan Keputusan

Kecepatan dan mudahnya penyebaran informasi dalam praktik demokrasi di era disrupsi teknologi memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemahaman publik dan proses pengambilan keputusan di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan informasi tersebar dengan cepat melalui media sosial, platform berita daring, dan saluran komunikasi digital lainnya. Namun, dampaknya terhadap pemahaman publik dan proses pengambilan keputusan perlu dipahami dengan baik.

Implikasi pertama adalah adanya potensi untuk terjadinya overload informasi atau informasi yang berlebihan. Dalam era disrupsi, jumlah informasi yang tersedia secara online sangat melimpah. Hal ini dapat menyebabkan pemahaman publik yang tidak lengkap, terfragmentasi, atau bahkan terdistorsi. Kebanyakan informasi yang tersedia tidak diverifikasi dengan baik dan sulit dipisahkan antara fakta dan opini. Overload informasi ini dapat mengaburkan persepsi publik dan menghambat pemahaman yang akurat tentang isu-isu politik. (Pariser, 2011 : 50-72)

Implikasi kedua adalah penyebaran informasi yang bias dan selektif. Dalam era disrupsi, individu cenderung mencari dan mengonsumsi informasi yang sesuai dengan pandangan atau keyakinan mereka sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai filter bubble, di mana algoritma platform digital menyaring informasi berdasarkan preferensi pengguna. Hal ini dapat memperkuat polarisasi opini dan menghambat pemahaman yang komprehensif dan beragam tentang isu-isu politik. Proses pengambilan keputusan yang sehat memerlukan pemahaman yang berimbang dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. (A. Johnson, 2012 : 85-103)

Pada pembahasan ini, kita dapat melihat implikasi dari kecepatan dan mudahnya penyebaran informasi dalam praktik demokrasi di era disrupsi terhadap pemahaman publik dan proses pengambilan keputusan di Indonesia.

#### **4. Bagaimana Perlindungan terhadap Integritas Pemilihan Umum di Indonesia di Tengah Era Disrupsi Teknologi**

Perlindungan terhadap integritas pemilihan umum menjadi sangat penting di Indonesia, terutama di tengah era disrupsi teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap pemilihan umum dengan munculnya berbagai platform digital dan media sosial. Namun, tantangan juga muncul dalam menjaga integritas pemilihan umum di era ini.

Salah satu tantangan utama adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks selama masa kampanye pemilihan umum. Dalam era disrupsi, informasi yang tidak akurat dapat dengan mudah disebarluaskan melalui platform digital, mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih. Perlindungan integritas pemilihan umum melibatkan upaya untuk memerangi penyebaran informasi palsu, memverifikasi fakta, dan memberikan pendidikan pemilih tentang kebenaran informasi yang mereka terima. (N. Hague & D. Loader, 1999 : 143-162)

Selain itu, perlindungan terhadap integritas pemilihan umum juga berkaitan dengan keamanan teknologi dan data. Keberadaan platform digital dan sistem elektronik dalam pemilihan umum membawa risiko terhadap serangan siber, manipulasi data, atau

pengaruh dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan teknologi dan data harus ditingkatkan untuk mencegah ancaman terhadap integritas pemilihan umum dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. (Michael Alvarez & E. Hall, 1998 : 98-115)

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dari perlindungan integritas pemilihan umum di era disrupsi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, baik itu peserta pemilihan, penyelenggara, maupun pemerintah, perlu menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam segala aspek pemilihan. Hal ini termasuk dalam penggunaan dana kampanye, proses pemilihan, dan pengawasan pemilihan umum secara keseluruhan. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap integritas pemilihan umum.

Pada pembahasan ini, kita dapat melihat upaya perlindungan terhadap integritas pemilihan umum di Indonesia di tengah era disrupsi teknologi. Buku-buku referensi tersebut memberikan pemahaman tentang dampak teknologi dalam pemilihan umum dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum di era digital.

## **5. Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Mekanisme Akuntabilitas Politik di Indonesia**

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme akuntabilitas politik di Indonesia. Kemajuan TIK telah mempengaruhi bagaimana informasi politik disampaikan, diakses, dan diproses oleh masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat beberapa dampak yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, TIK memperluas aksesibilitas informasi politik bagi masyarakat. Melalui internet dan media sosial, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kebijakan publik, program pemerintah, dan tindakan politik. Akses yang lebih luas ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memperkuat akuntabilitas para pemimpin politik, mengingat mereka dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kinerja dan tindakan politik yang dilakukan. (Nugroho, 2018 : 57-73)

Kedua, TIK membuka ruang partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam diskusi politik secara real-time. Hal ini memungkinkan adanya interaksi langsung antara masyarakat dan para pemimpin politik, serta meningkatkan transparansi dan responsivitas dalam praktik demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, mekanisme akuntabilitas politik dapat diperkuat melalui partisipasi publik yang lebih aktif. (Ida, 2015 : 92-108)

Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Ketidakeimbangan akses dan literasi digital dapat membatasi partisipasi publik dalam mekanisme akuntabilitas politik. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan kesenjangan digital ini dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau tendensius juga menjadi tantangan dalam memastikan akuntabilitas politik yang sehat.

Pada pembahasan ini, kita melihat dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap mekanisme akuntabilitas politik di Indonesia. Penerapan Inovasi Politik Menggunakan Teknologi, seperti Penggunaan Media Sosial dan Aplikasi Berbasis Teknologi, Mempengaruhi Praktik Demokrasi di Indonesia

Penerapan inovasi politik menggunakan teknologi, seperti penggunaan media sosial dan aplikasi berbasis teknologi, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi partisipasi politik dan interaksi antara masyarakat dan pihak politik. Namun, implikasi penggunaan teknologi dalam konteks demokrasi perlu diperhatikan dengan baik.

Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi dan mobilisasi politik telah mengubah cara kampanye politik dilakukan di Indonesia. Dengan media sosial, politisi dan partai politik dapat dengan cepat menyebarkan pesan, membangun citra, dan berinteraksi dengan pemilih potensial. Hal ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas, terutama di kalangan pemuda yang lebih terhubung dengan teknologi. Namun, penggunaan media

sosial juga membawa risiko polarisasi opini dan penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. (Evanty, 2018 : 102-120)

Selain media sosial, aplikasi berbasis teknologi juga digunakan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Misalnya, aplikasi untuk memfasilitasi proses pemilihan umum atau untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Aplikasi semacam ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses demokrasi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Namun, tantangan teknis, seperti akses internet yang terbatas di beberapa daerah, serta keamanan dan privasi data, perlu diperhatikan dalam penerapan aplikasi berbasis teknologi ini. (Nugroho, 2019 : 45-65)

Pada pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana penerapan inovasi politik menggunakan teknologi, seperti penggunaan media sosial dan aplikasi berbasis teknologi, mempengaruhi praktik demokrasi di Indonesia

## **6. Negara Republik Indonesia dapat Mengatasi Masalah Disinformasi dan Hoaks yang Mempengaruhi Proses Demokrasi di Era Disrupsi**

Masalah disinformasi dan hoaks merupakan tantangan serius dalam praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam era disrupsi teknologi. Penyebaran informasi yang tidak akurat dan tendensius dapat mempengaruhi pemahaman publik, memperburuk polarisasi politik, dan menghambat proses demokrasi yang sehat. Untuk mengatasi masalah ini, Negara Republik Indonesia perlu mengambil beberapa langkah strategis.

Pertama, perkuat literasi digital dan kritis masyarakat. Edukasi tentang pentingnya memverifikasi informasi dan mengembangkan kemampuan analisis kritis di tengah banjir informasi adalah langkah penting. Negara perlu menggalakkan program-program literasi digital yang melibatkan pendidikan formal dan non-formal untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan dalam memahami dan mengevaluasi informasi. (Koesmono, 2021 : 97-118)

Kedua, perkuat kerjasama dengan platform teknologi dan media sosial. Negara dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan media sosial untuk mengembangkan algoritma dan

mekanisme yang mempromosikan informasi yang akurat dan kredibel, serta mengidentifikasi dan menangani konten yang melanggar aturan dan regulasi.

Ketiga, perkuat peran lembaga pengawas dan regulasi. Negara perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur informasi dan media. Hal ini meliputi peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi penyebaran informasi di ruang digital dan media penyiaran. Penguatan peran ini melalui kebijakan yang jelas dan efektif akan membantu mengendalikan penyebaran disinformasi dan hoaks.

Keempat, promosikan keterbukaan dan transparansi. Negara perlu memastikan keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi yang benar dan akurat, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses demokrasi dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Negara Republik Indonesia dapat mengatasi masalah disinformasi dan hoaks yang mempengaruhi proses demokrasi di era disrupsi. Dengan menggalakkan literasi digital, memperkuat kerjasama dengan platform teknologi, memperkuat peran lembaga pengawas dan regulasi, serta mempromosikan keterbukaan dan transparansi, masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak negatif disinformasi dan hoaks dalam proses demokrasi.

## **7. Bagaimana Memanfaatkan Peluang Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia?**

Memanfaatkan peluang teknologi dapat menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam era disrupsi teknologi, kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menawarkan berbagai alat dan mekanisme yang dapat digunakan untuk memperkuat transparansi, memperluas akses informasi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Salah satu peluang teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah pembangunan platform dan sistem informasi yang terintegrasi. Melalui platform ini, pemerintah dapat menyediakan akses mudah dan transparan terhadap data publik, kebijakan pemerintah, anggaran, dan proses pengambilan keputusan. Contohnya adalah implementasi portal data terbuka atau open data, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan secara langsung. Dengan demikian, transparansi dalam tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan, dan masyarakat dapat lebih memahami kebijakan dan keputusan yang diambil. (Afandi, 2019 : 130-150)

Selain itu, teknologi juga memungkinkan penerapan sistem pelaporan dan pengaduan elektronik yang efektif. Dengan menggunakan aplikasi atau platform berbasis teknologi, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, atau praktik korupsi dengan mudah dan aman. Sistem pelaporan ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, karena pelanggaran dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti secara lebih efisien. Implementasi teknologi seperti ini juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Namun, dalam memanfaatkan peluang teknologi, perlu diingat bahwa ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan tersebut adalah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kesenjangan akses dan literasi digital antara kelompok masyarakat yang berbeda. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi dalam partisipasi politik dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, perlindungan data pribadi dan privasi juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas.

Pada pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana peluang teknologi dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

## **PENUTUP**

Dalam era disrupsi teknologi, praktik demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan baru yang perlu ditangani dengan cermat. Peluang dan dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik telah menjadi sorotan penting dalam menjaga integritas demokrasi. Melalui pembahasan tentang praktik demokrasi di era disrupsi, kita dapat melihat berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Tantangan penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau tendensius mempengaruhi pemahaman publik dan proses pengambilan keputusan menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, upaya untuk membangun literasi digital dan kemampuan kritis dalam mengonsumsi informasi menjadi semakin penting. Selain itu, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi menjadi hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan potensi teknologi dalam praktik demokrasi.

Di sisi lain, peluang teknologi juga memberikan harapan dalam meningkatkan transparansi, akses informasi, dan partisipasi publik. Dengan memanfaatkan platform dan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memberikan akses yang mudah dan transparan terhadap data publik, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Implementasi sistem pelaporan dan pengaduan elektronik yang efektif juga dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan tata kelola pemerintahan.

Namun, dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, kesenjangan digital dan perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama. Upaya untuk memastikan akses yang adil terhadap teknologi dan perlindungan privasi yang memadai bagi individu adalah langkah penting dalam menjaga integritas demokrasi di era disrupsi.

Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia dalam era disrupsi teknologi membutuhkan kewaspadaan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau tendensius, penting bagi masyarakat

untuk meningkatkan literasi digital dan kritis dalam mengonsumsi informasi. Sementara itu, pemanfaatan peluang teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan kesadaran akan tantangan dan potensi teknologi, kita dapat membangun praktik demokrasi yang lebih kuat dan responsif di era disrupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ross Tapsell, *Digital Politics in Indonesia: Freedom and Constraint in the Online Public Sphere*, (2020), hlm. 75-91.
- Jorge Luis Salcedo, *Democracy and Disruptive Technologies: A Critical Analysis of Technopolitics*, (2020), hlm. 46-62.
- Julia Schwanholz, *Democracy and Digital Technologies*, (2019), hlm. 137-155.
- Bruce Schneier, *Data and Goliath*, (2015), hlm. 215-230.
- Cailin O'Connor dan James Owen Weatherall, *The Misinformation Age: How False Beliefs Spread*, (2019), hlm. 125-143.
- Melissa Zimdars, *Fake News: Understanding Media and Misinformation in the Digital Age*, (2018), hlm. 76-94.
- Eli Pariser, *The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think*, (2011), hlm. 50-72.
- Clay A. Johnson, *Information Diet: A Case for Conscious Consumption*, (2012), hlm. 85-103.
- Barry N. Hague dan Brian D. Loader, *Digital Democracy, Discourse and Decision Making in the Information Age*, (1999), hlm. 143-162.
- R. Michael Alvarez dan Thad E. Hall, *Elections in Cyberspace: Toward a New Era in American Politics* (1998), hlm. 98-115.
- Heru Nugroho, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Politik Indonesia*, (2018), hlm. 57-73.
- Rachmah Ida, *Transformasi Politik Pasca Reformasi*, (2015), hlm. 92-108.
- Nukila Evanty, *Politik Media Sosial di Indonesia*, (2018), hlm. 102-120.
- Yanuar Nugroho, *Teknopolitik: Demokratisasi dan Perubahan Sosial di Era Digital*, (2019), hlm. 45-65.

Nukila Evanty, *Demokrasi Digital: Pemetaan Partisipasi Politik Online di Indonesia*, (2020), hlm. 78-95.

Wibowo Koesmono, *Demokrasi dan Tantangan Komunikasi di Era Digital*, (2021), hlm. 97-118.

Haryanto Affandi, *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, (2019), hlm

# WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI SATUAN KESATUAN SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, BUDAYA, DAN HUKUM

*Agung Utomo, Ery Setyanegara, Nabila Zatadini*

DRPD Lampung Utara  
agungutomoktb@gmail.com

## **ABSTRAK**

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satuan kesatuan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan. Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan.

**Kata Kunci:** Wawasan, Nusantara, Kesatuan

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Wawasan Nusantara berasal dari kata 'wawasan' dan 'Nusantara'. Wawasan berasal dari kata 'wawas' (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata 'mawas' yang berarti memandangi, meninjau atau melihat. Seperti diketahui negara Indonesia merupakan negara multikultural. Indonesia memiliki suku, ras maupun agama yang sangat beragam. Itulah mengapa, penting memahami banyaknya perbedaan tersebut melalui wawasan Nusantara. Secara keseluruhan, wawasan Nusantara merupakan "cara pandang" bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya adalah pelaksanaan dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial-budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk itu pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinnekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan

Nasional Indonesia dan diberi nama Wawasan Nusantara, disingkat "Wasantara" Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, social budaya dan hankam merupakan suatu pedoman yang dibutuhkan dalam suatu Negara. Bangsa Indonesia

sebagai salah satu Negara yang menjunjung tinggi wawasan nusantara untuk upaya pelestarian pengetahuan nusantara tidak pernah meninggal unsur unsur penting didalamnya. Unsur penting meliputi : persatuan dan kesatuan, politik, ekonomi, social budaya dan hankam.

Meningkatkan wawasan nusantara merupakan tugas seluruh warga Indonesia, khususnya mahasiswa sebagai penggerak masyarakat harus selalu menerapkan pengetahuan tentang wawasan nusantara. Sebagai persyaratan umum untuk melakukan kegiatan di bidang politik adalah mengetahui tentang wawasan nusantara dan cara penggunaannya. Oleh karena itu artikel ini di tulis untuk menambah wawasan nusantara bagi pembaca. Artikel ini diberi judul “Wawasan Nusantara: Sebagai Satu Kesatuan, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam di Indonesia” Contoh kasus wawasan nusantara yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah Sengketa Terpecahnya Negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika membahasa Timor Leste atau yang sekarang disebut negara Timur-Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah lama hilang. Wilayah itu dulu merupakan wilayah bagian dari Indonesia. Namun setelah jajak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di lihat dari jejak asal usulnya Timor Leste merupakan wilayah jajahan portugis padavmasa silam.

Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih di sebabkan perebutan lahan pertanian (Sumber Daya Alam) antara kedua warga negara yakni warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur dan warga Passabe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Permasalah mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu, namun pendekatan pembangunan Ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut.

## PEMBAHASAN

### a) Fungsi wawasan nusantara secara umum :

Fungsi wawasan nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu untuk memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan serta perbuatan dalam penyelenggaraan negara, baik pusat maupun daerah. Wawasan nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan serta langkah pembangunan nasional di Indonesia.

### b) Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli:

- Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan serta kewilayahan.
- Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional yaitu meliputi kesatuan politik, sosial dan ekonomi, kesatuan pertahanan serta keamanan.
- Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara.
- Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

### Tujuan Wawasan Nusantara Nasional

Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## Tujuan Wawasan Nusantara Keluar

Tujuan wawasan nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Lalu, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap saling menghormati.

## Tujuan Wawasan Nusantara Ke Dalam

Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.

## Cara Meningkatkan Wawasan Nusantara

Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa mengandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Cara Meningkatkan rasa Persatuan dan Kesatuan Melalui Wawasan Nusantara antara lain :

1. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong-royong, dan musyawarah.
2. Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
5. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum.
6. Melindungi, menjamin, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi.

### **c) Unsur Unsur Dasar Wawasan Nusantara**

#### 1) Wadah

Wawasan nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen, yaitu :

- a. Wujud wilayah
- b. Tata inti organisasi
- c. Tata kelengkapan organisasi

#### 2) Isi wawasan nusantara

Isi wawasan nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.

- a. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :
  - 1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
  - 2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
  - 3) Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh yang meliputi :
  - 1) Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan dirgantara secara terpadu.
  - 2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional
  - 3) Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “Bhineka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
  - 4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
  - 5) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)

- 6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.
- 3) Tata laku wawasan nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah
- a. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini wawasan nusantara berlandaskan pada falsafah pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa dan karsa secara terpadu.
  - b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini wawasan nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

- 1) Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
- 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
- 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

- 1) Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.
- 2) Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

Dalam beberapa riset menunjukkan bahwa dukungan sosial diyakini bisa menjadi alat bantu atau penunjang untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Hal ini dikarenakan dengan adanya dukungan sosial yang baik maka akan menciptakan sebuah lingkungan yang baik pula. Lingkungan yang baik akan memberikan rasa nyaman yang membuat seseorang merasa dikasih sayang dan dicintai. Sehingga mampu membentuk suasana emosi yang baik, dan membuat orang tersebut bahagia selalu. Seperti yang sudah banyak dijelaskan dari berbagai sumber, bahwa banyak penyakit muncul akibat stress atau keadaan emosional yang kurang baik. Oleh karena itu, perlu dipelajari dan dipahami lagi mengenai dukungan sosial lebih dalam lagi, agar mampu untuk menjadi alat bantu meningkatkan derajat kesehatan seseorang

## **KESIMPULAN**

Sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki wawasan nusantara sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme. Pemahaman wawasan nusantara juga akan meningkatkan rasa bangga atas bangsa karena sesungguhnya Indonesia dikaruniai dengan keberagaman, tetapi tetap bisa bersatu.

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, politik, ekonomi, social budaya dan hankam. Di samping itu Wawasan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sodik, M. A. (2014). Sikap Pencegahan Aborsi Ditinjau Dari Pengetahuan Tentang Bahaya Dan Resiko Kesehatan. *Strada Jurnal Kesehatan*  
<http://publikasi.stikesstrada.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/9-SIKAP-SIKAPPENCEGAHAN-ABORSI.pdf>.
- Honggu, N. N. (2021). Dampak mengonsumsi minuman beralkohol bagi remaja. *ISO 690*
- Triwahyuni, D. (2010). *Wawasan Nusantara*.
- Adibowo, R. (2010). *Wawasan Nusantara Indonesia*.
- Sutarwati, S. (2013). PERANAN PENGANGKUTAN UDARADI INDONESIA DALAM MENUNJANG PENGIMPLEMENTASIAN WAWASAN NUSANTARA.  
*Jurnal Manajemen Dirgantara*, 6(2), 51-58.
- Awan, I., & Sodik, M. A. (2018). *Diskriminasi dan Kesehatan Mental*.
- Karina, Z., & Sodik, M. A. (2018). *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kesehatan*.

# HAKIKAT KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA

*Muhammad Nuzul Setiawan, Didiek R. Mawardi,  
Adinda Akhsanal Viqria*

*Ketua Partai Keadilan dan Kesejahteraan Lampung Utara  
dihyarobbany17@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk menjadikan warganya warga negara yang baik, karena warga negara yang baik tidak dapat secara langsung mendukung pembangunan berkelanjutan di negara terkait. Metode penelitian ini mengadopsi studi literatur atau metode penelitian sastra, yang memuat teori-teori teoritis yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang mengumpulkan data dengan mempelajari buku, dokumen, catatan dan laporan yang berkaitan dengan pemecahan masalah, dan diharapkan pendidikan di Indonesia akan memampukan peserta didik. dipersiapkan untuk menjadi warga negara. Mereka tegas dan konsisten dalam mempertahankan negara kesatuan NKRI, dan pembangunan ciri-ciri bangsa dijadikan sebagai penggerak utama pembangunan negara. Artinya, setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada aspek yang berdampak positif bagi pembangunan karakter.

**Kata kunci :** Pendidikan, Pendidikan kewarganegaraan, karakter.

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang utuh. Oleh karena itu, proses pendidikan kewarganegaraan dimasukkan kedalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jenjang Pendidikan sekolah dasar sampai ke universitas. fungsi dan peran Pendidikan kewarganegaraan itu untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk bisa memahami mata kuliah/ mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. maka dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks tujuan pendidikan nasional. Karena itu semua merupakan landasan dan pola pikir Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan ialah bentuk penggabungan individu-individu agar mendukung dan memperkuat politik dinegaranya, sepanjang politik itu hasil dari kesepakatan. Tidak mungkin Pendidikan kewarganegaraan itu menentang atau berlawanan dengan politik yang ada di negara tersebut. Justru sebaliknya, Pendidikan kewarganegaraan mendukung dan memperkuat politiknya. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri adalah agar warganya menjadi warga negara yang baik, karena warga yang baik secara tidak langsung mendukung keberlangsungan negara yang bersangkutan.

Proses dari pendidikan Kewarganegaraan itu untuk memberdayakan dan mem-budayakan peserta didik dalam arti bahwa proses dan hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar untuk memperluas wawasan belajar untuk membangun kemampuan belajar yang akan berguna untuk hidup dan berkehidupan yang akan datang dinegara tersebut. Pendidikan kewarga-negaraan merupakan proses pendidikan untuk membangun keteladanan kemauan dan kemampuan mengembangkan kreatif-itas yang mencerminkan jati diri bangsa yang syarat dengan nilai-nilai sosial kultural ke-indonesiaan. Pendidikan Kewarga-negaraan (Civic Education) yang me-nempatkan secara proporsional aspek pen-didikan, seperti: pengajaran sejarah pem-bentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda.

F.Peliger (1970:5) menyatakan bahwa secara terminologis civics diartikan sebagai studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-kewajiban warganegara. Namun dalam salah satu artikel tertua yang merumuskan definisi civics adalah tentang masalah “education “. Pada tahun 1886, Civics adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan Negara (Winarno, 2007).

Menurut Zamroni, Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Sedangkan menurut Merphin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga Negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun politik yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bias dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara.

Menurut Kansil (1994:84) Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur, moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civic: memiliki banyak pengertian dan istilah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian ini, Muhammad Numan Somantri (dalam Ubaedillah, 2015, hlm. 13) menyatakan: "Pengertian Civics sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); (b) individu-individu dengan negara".

Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan program pendidikan yang mempunyai lingkungan interdisipliner yang didasarkan pada teori disiplin ilmu sosial, yaitu inter-disipliner dan multidimensi, dan disiplin ilmu tersebut didasarkan pada disiplin ilmu politik yang terstruktur. Menurut National Council for Social Research (NCSS), kewarganegaraan adalah proses yang mencakup semua pengaruh positif dan bertujuan untuk membentuk pandangan warga tentang peran mereka dalam masyarakat. Sebagai program pendidikan, tujuan utama kewarganegaraan adalah membangun warga negara yang lebih baik berdasarkan kondisi, standar, dan standar ukuran (sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945) (Cholisin, 2000: 1.7).

Dalam kesempatan yang sama, Nu'man Soemantri menjelaskan bahwa PKN merupakan program pendidikan dengan inti demokrasi politik yang berkembang dengan berkembangnya sumber-sumber ilmu lain, dan berdampak besar bagi pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Agar berdampak positif, semua ini telah dilatih untuk mengembangkan ke-terampilan berpikir kritis siswa. Melakukan tindakan demokrasi secara analitis dan mempersiapkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2000:1.7). Menurut Sunarso, dkk (2008:1), pendidikan

kewarga-negaraan merupakan bidang penelitian yang misinya mencerdaskan bangsa Indonesia melalui koridor “pendidikan berbasis nilai”.

Menurut Somantri Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Menurut Somantri Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu hal atau wahana yang dapat mengembangkan dan melestrarkan nilai-nilai luhur serta moral yang diharapkan dapat membentuk perilaku dan sikap suatu kelompok atau individu guna dapat menjalin hubungan antar manusia dengan baik dan menjadi lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa serta seni. Mewujudkan warga negara sadar belanegara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, professional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Fungsi

pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2001:1).

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam belanegara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Standarisasi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan:

- a. Nilai-nilai cinta tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara
- d. Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta
- f. Kemampuan awal belanegara.

Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup :

a) Tujuan Umum

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warganegara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang mulai tahun 2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian atau MKPK.

b) Tujuan Khusus

- 1) Agar peserta didik dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab
- 2) Agar peserta didik menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan

bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

- 3) Agar peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan dan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*) dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*). Sebagaimana menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di atas yaitu untuk mengetahui dan memahami isi dan makna yang terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya pendidikan yang menyangkut pembentukan dan pengembangan pribadi dan anak didik, atau dengan kata lain merupakan salah satu cara untuk membentuk watak bangsa Indonesia serta membentuk kepribadian manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945.

### C. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Wahab (dalam Wuryan dan Syaifullah, 2008) karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: Lahirnya warga negara dan masyarakat yang berjiwa Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui hak dan kewajiban, dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab agar dapat membuat keputusan secara tepat dan cepat baik untuk dirinya dan orang lain.

Berdasarkan pernyataan Wahab tersebut mengungkapkan bahwa karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya ialah untuk membentuk warga negara yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan sadar akan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pemeran penting, perlu mengenalkan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter sebuah bangsa. Demi kemajuan sebuah bangsa ada beberapa karakter yang menjadi patokan dalam pengembangan karakter bagi generasi muda, yaitu:

1. Religious: sikap yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, namun tidak meremehkan agama lain. Dengan karakter yang religious diharapkan dapat menjadi landasan nilai, moral dan etika dalam bertindak.
2. Jujur: perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Dengan menjadi pribadi yang jujur maka akan kecil kemungkinan terjadi kesalah pahaman dan saling menuduh, membenci karena merasa telah dibohon
3. Tanggung jawab: dengan adanya tanggung jawab di setiap tindakan yang dilakukan, hal ini akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut layak untuk mendapatkan mandat dan dapat menanggung akibat dari tindakannya.
4. Toleransi: sikap dan tindakan yang menghargai adanya setiap perbedaan. Dengan bertoleransi akan memudahkan tiap individu untuk saling berbaur tanpa adanya diskriminasi.

5. Disiplin: menaati tiap aturan atau tata tertip yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut sangat menghargai dan munjung tinggi setiap aturan yang telah disepakati.
6. Kerja keras: dengan berusaha keras dalam setiap tindakan, mandiri, optimis dan tegas akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut merupakan pribadi yang berkarakter dan layak diajak untuk bekerja sama.
7. Kreatif: dengan berpikir secara kreatif dan kritis akan menunjukkan sebagai pribadi yang cerdas. Akan menghindarkan dari tindakan plagiatisme dan memunculkan sesuatu yang lebih inovatif.
8. Demokratis: cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Mengetahui apa yang lebih penting dan apa yang harus didahulukan.
9. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air: hal ini diperlukan karena tanpa adanya kesadaran, semangat kebangsaan dan cinta tanah air dari para warga negara, maka sampai kapanpun bangsa yang berkarakter tidak akan pernah terwujud karena karakter bangsa itu sendiri muncul dari para warga negaranya.
10. Peduli lingkungan dan sosial: cerminan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat akan membawa tiap individu menjadi pribadi yang disegani, dicintai dan dilindungi oleh lingkungan-sosial tersebut.

#### **D. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar, merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, *the rule of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara juga menganut sistem konstitusional, dengan Pemerintah berdasarkan

konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan "demokrasi konstitusional" (*constitutional democracy*), yakni praktik demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Meskipun memilih bentuk negara kesatuan, para pendiri bangsa sepakat bahwa untuk mengelola negara sebesar, seluas dan semajemuk Indonesia tidak bisa tersentralisasi. Negara seperti ini sepatutnya dikelola, dalam ungkapan Mohammad Hatta "secara bergotong-royong", dengan melibatkan peran serta daerah dalam pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial-budaya sesuai dengan keragaman potensi daerah masing-masing. Itulah makna dari apa yang disebut Muhammad Yamin sebagai negara kesatuan yang dapat melangsungkan beberapa sifat pengelolaan negara federal lewat prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi (AB Kusuma, 2004).

Perjuangan ke depan adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan wadah pemersatu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang merupakan modal untuk bersatu dalam kemajemukan.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Semua agama turut memperkuat integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, hormat-menghormati, dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin setiap warga bangsa. Konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

### **E. Faktor Yang Berasal Dari Dalam Negeri, Antara Lain :**

1. Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antarumat beragama;
2. Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap pembangunan dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan;
3. Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa;
4. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika;
5. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa;
6. Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah masyarakat;
7. Adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar;
8. Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang (Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa);
9. Pemahaman dan implementasi otonomi daerah yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi (Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia).

## **F. Faktor-Faktor Yang Berasal Dari Luar Negeri Meliputi, Antara Lain :**

1. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antarbangsa yang semakin tajam;
2. Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Faktor-faktor penghambat yang sekaligus merupakan ancaman tersebut dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan kemajuan.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan kewarganegaraan sejatinya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu warga negara melalui pendidikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting peranannya dalam membangun karakter bangsa. Bangsa yang berkarakter lahir karena para warga negaranya mempunyai kredibilitas dalam melakukan tindakan yang berbudi luhur sesuai apa yang ada dalam ajaran bernegara.

Generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasila tampaknya sudah mulai terkikis oleh perkembangan jaman. Jika dibiarkan hal ini dapat meruntuhkan keyakinan masyarakat bahwa bangsanya sudah tidak tangguh dan berkarakter. Oleh karenanya dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap karakter bangsanya, menjadikan mereka warga negara yang baik dan terpadang di mata dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suharyanto, A. 2013. "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa". *Journal of Governance and Political Social UMA*.
- Rahayu Umami, S, T. 2019. "Pengaruh Model Group to Group Exchange terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran PPKN". [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu)
- Setiarsih, A. 2017. "Diskursus Pendidikan Kritis (Critical Pedagogy) dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan". *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Thane, S. 2017. "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara".
- Akbal, M. (2017, October). Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 485-493)*.
- Dianti, P. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1).
- Saputra, E. (2016). Peranan Metode Diskusi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Tingkap*, 11(1), 26-40.
- Kurniawan, M. I. (2013). Integrasi Pendidikan Karakter Ke Dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 1(1), 37-45.
- Gunawan, H. 2012. *Pendidikan Karakter (Konsep dan Implementasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad F. Z, Dinie A. D. (2021) *Jurnal PEKAN Vol. 6 No.1*

# INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

*Joni Bedyal, Al Fitri, Ibrahim Fikma*

DPRD Lampung Utara  
joni.bedyal05@gmail.com

## **ABSTRAK**

Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, etimisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu faklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib seperjuangan, keinginan untuk bersatu rasa cinta tanah air dikalangan Bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor yang heleragan, wilayah negara yang begitu luas adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar negeri, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui strategi dan pendekatan yaitu gaya politik kepemimpinan kekuatan lembaga-lembaga politik idiologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi.

**Kata Kunci:** intgrasi, kesatuan, bangsa

## A. PENDAHULUAN

Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional di katakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia sebagai sebuah negara dalam realitasnya terpisah pada beberapa bagian dan tingkatan, dari segi geografis dipisahkan oleh lautan dengan beratus- ratus pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil. Masih banyak pulau yang belum diberi nama, bahkan belakangan ini dua pulau yang berada di kawasan Kalimantan telah menjadi milik Negara Malaysia. Dari perspektif kewilayahan tampak pembagian Indonesia Bagian Timur dan Indonesia Bagian Barat atau kawasan perkotaan dan perdesaan.

Realitas itu menyebabkan pula kewargaan penduduk Indonesia berbeda-beda dari segi kebudayaan. Pengelompokan kewargaan serupa itu diwujudkan dalam satuan-satuan etnik. Menurut kajian Hildred Geetz (1963), terdapat 300 kelompok etnik dan 250 jenis bangsa yang setiap kelompok etnik itu memiliki identitas kebudayaan sendiri, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa yang digunakannya. Di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berasalkan kemajemukan. Saat ini pula bangsa Indonesia, masih mengalami krisis multidimensi yang menggoncang kehidupan kita. Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum merdeka. Kesadaran akan pentingnya kerukunan antar agama, suku, ras dan budaya harus selalu diwujudkan melalui pemahaman integrasi nasional.

## **B. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Integrasi Nasional**

Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata sosial. Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras (harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai Integrasi Sosial (Theodorson & Theodorson, 1979 dalam Danandjaja, 1999).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan.

Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional.

Dalam antropologi integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya integrasi nasional dalam sebuah bangsa, beberapa diantaranya ialah:

1. Rasa senasib dan seperjuangan

faktor pendukung yang paling utama dalam integrasi nasional adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Sebagai contoh, rasa tersebut dahulu muncul ketika masa penjajahan, di mana warga Indonesia seluruhnya bersatu untuk merdeka. Keinginan tersebut karena dilandasi sebuah yang sama, dan tidak peduli dengan suku, agama, ras, serta golongan.

2. Rasa cinta Tanah Air

Salah satu faktor yang memengaruhi integrasi nasional adalah adanya rasa cinta tanah air di kalangan Bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa perjuangan untuk merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa kini.

3. Ingin bersatu

Satu di antara banyak peristiwa yang menunjukkan sebuah keinginan masyarakat Indonesia untuk Bersatu yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Seluruh rakyat Indonesia ingin bersatu di dalam semangat perjuangan yang sama, tentunya sesuai cita-cita nasional.

4. Antisipasi dari ancaman asing

Integrasi nasional tidak kalah penting untuk antisipasi adanya ancaman dari asing. Ada berbagai bentuk ancaman dari pihak asing tersebut, seperti upaya pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia.

5. Budaya gotong royong

Selain itu, integrasi nasional dapat timbul karena adanya budaya gotong royong. Budaya gotong royong sendiri adalah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang secara turun temurun tetap dijaga dan dipertahankan hingga saat ini.

6. Sebagai wujud ideologi nasional

Integrasi nasional juga merupakan wujud ideologi nasional yang sudah disepakati bersama. Melalui ideologi Pancasila, Indonesia memiliki banyak perbedaan serta keragaman agar dapat tetap

bersatu. Ini karena nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

Integrasi Nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu “integrasi” dan “nasional”. Dalam Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian “pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”. Sedangkan istilah “nasional” mempunyai pengertian :

- 1) Bersifat kebangsaan
- 2) Berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri
- 3) Meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional dan sebagainya.

Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Myron Weiner dalam Juhardi (2014) memberikan lima definisi mengenai integrasi yaitu :

1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.

2. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan definisi di atas dapat dinyatakan, bahwa Integrasi merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah, kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Sunyono Usman (1998) menyatakan, bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila : 1) masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama, 2) masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki “cross cutting affiliation” (anggota dari berbagai kesatuan sosial), sehingga menghasilkan “cross cutting loyalty” (loyalitas ganda) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial dan 3) masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

## **Pengembangan Integrasi di Indonesia**

Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin Max Andrews (1995) menyebut ada lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah : 1) adanya ancaman dari luar, 2) gaya politik kepemimpinan, 3) kekuatan lembaga-lembaga politik, 4) ideologi nasional dan 5) kesempatan pembangunan ekonomi.

1. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan rasa ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintergrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.
2. Gaya politik kepemimpinan gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya.
3. Kekuatan lembaga-lembaga politik lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.

Integrasi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima

satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal “Pela Gadong” sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku.

4. Kesempatan pembangunan ekonomi jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai.

Pendapat lain menyebutkan, integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan yaitu “policy asimilasionis” dan “policy bhineka tunggal ika” (Sjamsudin, 1989). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampilkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia : a) Memperkuat nilai bersama, b) Membangunfasilitas, c) Menciptakan musuh bersama, d)

Memperkokoh lembaga politik, e) Membuat organisasi untuk bersama, f) Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, g) Mewujudkan kepemimpinan yang kuat, h) Menghapuskan identitas-identitas local, i) Membaurkan antar tradisi dan budaya local, j) Menguatkan identitas nasional.

### **Pentingnya Integrasi Nasional**

Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materiil seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Disisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi

masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

Al Hakim (2001) mengemukakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang “solid” dan integrasi yang mantap serta kokoh. (1) kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan SARA dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potens bangsa. (2) kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya dunia memang selalu berubah seirama dengan perubahan masyarakat dunia.

### **Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional**

Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dri integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar lima jenis integrasi sebagai berikut :

- a. Integrasi bangsa, tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of Understanding) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.
- b. Integrasi wilayah, melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini

maka terjadi integrasi wilayah teritorialitas Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

- c. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi ? jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan pancasila baik dengan maka kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn. Melalui pelajaran ini, pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.
- d. Integrasi elit-massa dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional.
- e. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sidang PPKI ke 2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas.

### **Tantangan Dalam Membangun Integrasi**

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. Sedangkan dalam dimensi

vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol dari pada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horisontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan intregasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bangsa, daerah, agama dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam intregasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa di pinggirkan.

Tantangan dari dimensi vertikal dan horisontal dalam intregasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki erat reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalah gunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakan-gerakan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horisontal.

Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horisontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewartakan tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi yakni aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

## **PENUTUP**

Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras (harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai Integrasi Sosial Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol dari pada dimensi vertikalnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Hakim, 2001. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*. Edisi Khusus Okt. Lab. PPKn Universitas Negeri Malang.
- Amal, Ichlasul & Armaidly Armawi, (ed). 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Arfani, RN. 2001. "Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia" dalam *Jurnal Sosial Politik*. UGM ISSN 1410-4946. Volume 5, Nomor 2, November 2001 (253-269).

- Armawi, A. 2012. Karakter Sebagai Unsur, Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta.
- Bahar, S. 1996. Integrasi Nasional. Teori Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Juliardi, Budi. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurana, S. 2010. National Integration : Complete Information on the meaning, features promotion of national integration in India in <http://www.preservearticles.com/2010L221786/national-integration.html>
- Muhaimin, Y & Collin MA. 1995. Masalah-masalah Pembangunan Politik Yogyakarta. Gadjah Mada Universitas Press.
- Sanusi, A. 2006. Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial. Bandung : CICODE.
- Sjamsuddin, N. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia.
- Soedarsono, S. 1997. Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional. Jakarta : Intermedia.
2003. Membangun Kembali Karakter Bangsa. Tim Sosialisasi Penyemaman Jati Diri. Jakarta : PT Flex Media Komputindo.

